



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KUNJUNGAN PAUS FRANSISKUS: MOMENTUM MEMPERERAT TOLERANSI ANTARAGAMA DI INDONESIA

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Putu Ayu Dhana Reswari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
putu.reswari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tanggal 3-6 September 2024 menjadi tonggak penting dalam hubungan antara Indonesia dan Gereja Katolik, serta memperkuat tradisi panjang hubungan ini. Sejak Paus Paulus VI mengunjungi Indonesia pada tahun 1970, Indonesia telah menjadi perhatian khusus dalam misi kepausan, terutama karena keberagaman agama dan komitmennya terhadap toleransi. Paus Fransiskus, yang memiliki latar belakang sebagai Jesuit, dikenal karena fokusnya pada isu-isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi dialog antaragama dan solidaritas sosial di Indonesia.

Indonesia, dengan keberagaman agama dan budaya, telah lama menjadikan dialog antaragama sebagai sarana penting untuk menjaga harmoni. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk meredakan perselisihan agama dan menjaga keharmonisan antarumat beragama. FKUB mencerminkan komitmen negara dalam mengatasi masalah yang terkait dengan perbedaan keyakinan. Dengan adanya forum ini, berbagai agama di Indonesia dapat berdialog dan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama.

Pentingnya dialog antaragama di Indonesia tidak terlepas dari fakta bahwa negara telah menjamin kebebasan beragama dan menyediakan fasilitas ibadah yang merata untuk semua agama. Indonesia memiliki proporsi rumah ibadah yang cukup seimbang antara jumlah tempat ibadah dan penganut agama. Misalnya, umat Islam memiliki sekitar 296.000 masjid untuk 237 juta penganut, sementara umat Kristen memiliki 60.000 gereja untuk sekitar 20 juta penganut. Rasio yang seimbang ini juga berlaku untuk agama lain seperti Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Fakta ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyediakan ruang bagi semua agama untuk beribadah dengan bebas dan adil.

Namun, meski ada kemajuan dalam dialog antaragama dan penyediaan fasilitas ibadah, tantangan terkait toleransi masih ada. Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 dari Setara Institute menunjukkan bahwa beberapa kota di Indonesia masih menghadapi masalah toleransi. Kota-kota seperti Depok, Banda Aceh, dan Padang tercatat sebagai kota dengan skor toleransi terendah. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya toleransi di kota-kota ini adalah regulasi yang membatasi kebebasan beragama serta kurangnya dukungan dari kepemimpinan daerah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran. Kebijakan yang diskriminatif, serta aturan yang mengkriminalisasi kebebasan beragama, menjadi penghalang bagi peningkatan toleransi di wilayah tersebut.

Di sisi lain, terdapat kota-kota yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal toleransi beragama. Kota-kota seperti Singkawang, Bekasi, Salatiga, dan Manado mencatat skor toleransi yang tinggi berkat adanya regulasi yang mendukung keberagaman, tindakan nyata dalam membina toleransi, dan heterogenitas keagamaan yang tinggi. Kota-kota ini dinilai berhasil dalam mengembangkan ekosistem toleransi yang inklusif, di mana keberagaman agama dihormati dan dilindungi oleh peraturan yang ada. Peningkatan ini juga didukung oleh kepemimpinan daerah yang proaktif dalam mendorong dialog lintas agama serta mengimplementasikan regulasi yang adil bagi semua penganut agama.

Kunjungan Paus Fransiskus diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan perdamaian di Indonesia. Sebagai pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus dikenal karena pesan-pesannya tentang persatuan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kaum marginal. Dalam konteks Indonesia yang beragam, kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Paus untuk menegaskan pentingnya harmoni antaragama dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Paus Fransiskus juga diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada umat beragama di Indonesia untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan agama, suku, dan budaya.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini guna menyusun program-program yang lebih terstruktur dalam mendukung kerukunan antarumat beragama. Meningkatkan kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan memastikan implementasi kebijakan yang mendukung kebebasan beragama adalah langkah penting. Selain itu, Komisi VIII DPR RI dapat meminta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk perlu mendukung kota-kota dengan skor toleransi rendah guna mengatasi regulasi diskriminatif dan mempromosikan kebijakan inklusif. Melalui pendidikan dan pelatihan untuk pemimpin agama dan masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mendorong praktik toleransi yang lebih baik dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Kunjungan ini seharusnya menjadi pendorong untuk reformasi yang mendalam dalam pengelolaan kerukunan beragama di Indonesia.

Sumber

bbc.com, 31 Januari 2024;
kabar24.bisnis.com, 3 September 2024;
kompas.id, 28 Februari 2024;
rri.co.id, 4 September 2024;
timesindonesia.co.id, 4 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024